

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab I mengkaji terkait latar belakang penelitian skripsi ini dilakukan. Latar belakangnya terkait dengan jatuhnya Husni Mubarak pada Februari 2011 di Mesir yang menandai lahirnya liberalisasi politik bagi rakyat Mesir. Liberalisasi politik yang dimaksud adalah diberikannya kebebasan bagi rakyat Mesir untuk mendefinisikan hak-hak politiknya yang selama rezim Mubarak tidak tersalurkan. Liberalisasi politik ini menjadikan rakyat Mesir kembali menentukan kedaulatannya dalam menata kembali ikatan sosial kebangsaan yang sedang rapuh di tengah krisis politik pasca jatuhnya Mubarak.

Liberalisasi politik pasca jatuhnya Mubarak menjadi momentum yang sangat strategis bagi Ikhwanul Muslimin dalam mendirikan partai politik untuk berperan di tengah krisis politik di Mesir. Ikhwanul Muslimin merupakan persaudaraan umat Islam yang selama rezim Mubarak tidak mendapatkan hak politiknya sebagai warga negara. Ikhwanul Muslimin selalu disisihkan, bahkan dicap sebagai kelompok Islam fundamentalis yang tidak memihak kepada demokrasi dan modernisasi.

Ketika Mubarak tumbang, Ikhwanul Muslimin hadir dengan mendirikan partai politik bernama *Freedom Justice Party* (FJP). Partai yang didirikan Ikhwanul Muslimin memenangkan Pemilu Legislatif yang digelar mulai November 2011 sampai Januari 2012. Kemenangan FJP ini menarik karena partai

yang baru lahir pasca tumbangya Mubarak ini hanya mempunyai 11 bulan untuk mempersiapkan diri menghadapi Pemilu.

Dari sinilah, kajian tentang kemenangan FJP menarik diteliti. Skripsi ini meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan FJP dalam Pemilu Legislatif pasca tumbangya Mubarak. Hipotesisnya ada dua; 1) program kerja FJP sesuai dengan semangat revolusi dan tokoh-tokohnya berpengaruh di masyarakat; 2) kuatnya ikatan ideologis antara pendukung Ikhwanul Muslimin dengan FJP.

Masalah akademik dan hipotesis tersebut dijawab dengan teori partai politik dan teori tentang variabel yang berpengaruh dalam memilih partai politik. Variabel yang berpengaruh menurut Angus Campbell ada tiga; identifikasi partai, isu yang berkembang dan orientasi terhadap calon (kandidat). Mark N. Hagopian juga memberikan teori terkait mengapa masyarakat memilih partai politik, yakni ideologi partai, keuntungan yang diraih, isu yang berkembang dan tradisi dalam melakukan pemilihan.

Teori Angus Campbell dan Mark N. Hagopian inilah yang dijadikan alat untuk menganalisis data tentang FJP dan Pemilu legislatif Mesir. Skripsi ini dibagi ke dalam lima bab; pendahuluan, transisi politik Mesir pasca Mubarak, sejarah Pemilu Legislatif pasca Mubarak, faktor-faktor kemenangan FJP dan penutup.

Bab II mengkaji tentang transisi politik di tengah dan pasca jatuhnya Mubarak. Jatuhnya Mubarak tidak bisa dilepaskan dari peran media sosial yang berkembang di dunia. Sebagai seorang militer, Mubarak bertindak militeristik

yakni menangkap lawan politik yang tidak sejalan. Media publik dikuasai olehnya, tetapi media sosial semisal facebook, twitter dan sejenisnya, tak bisa dijangkau. Media sosial inilah yang menggerakkan perubahan, karena berbagai keganjilan dan keganjilan politik diperbincangkan secara serius dalam media sosial. Pengaruh media sosial memang sangat berkembang cepat menghasilkan berbagai aksi dari berbagai kalangan baik akademisi, politisi maupun praktisi. Semua mudah mendapatkan informasi yang dapat diakses di internet dalam situs-situs tertentu yang menggambarkan kondisi Mesir.

Dimulai dari kematian Kholed Said pada 6 Juni 2010 yang dianiaya polisi karena Said dituduh membagikan rekaman vidio yang memperlihatkan polisi telah berbagi-bagi mariyuana hasil penyitaan di lapangan. Wael Ghonim salah seorang eksekutif perusahaan jasa informasi internet terbesar di dunia Goggle inc., kemudian menyebarkan isu kematian tragis Said kepada publik. Saat itu, ribuan orang Mesir mulai bergabung untuk berbagi konten melalui facebook.

Aksi gigih Ghonim ini mendapatkan sambutan cepat rakyat, khususnya kaum muda. Dari sinilah, kaum muda kemudian bergerak. Kaum muda mesir mengalami masa kebangkitan, sehingga ketika menemukan momentum, kaum muda ini berani melakukan protes politik untuk sebuah perubahan. Fenomena kebangkitan kaum muda di Mesir dapat digambarkan dalam tiga hal. *Pertama*, kebangkitan kaum muda kelas menengah yang terjun dalam dunia bisnis. *Kedua*, kebangkitan kaum muda terpelajar. *Ketiga*, kaum muda yang aktif menggunakan media sosial khususnya facebook dan twitter. Menurut laporan yang dikeluarkan

pemerintah tentang teknologi informasi di Mesir, bahwa kaum muda Mesir adalah pengguna facebook terbesar di dunia Arab.

Hadirnya facebook dan twitter telah memungkinkan mereka membicarakan masalah-masalah sosial-politik, sehingga perlu dilakukan upaya perubahan. Ketiga hal tersebut merupakan gagasan yang telah berhasil melahirkan revolusi 25 Januari. Kaum muda Mesir memandang, mereka mempunyai potensi yang besar untuk membangun dan menjadikan negaranya sebagai salah satu kemenangan peradaban terbesar di dunia Arab, bahkan di dunia internasional.

Gerakan kaum muda menghadapi rezim Mubarak ini membentuk persatuan bernama "Koalisi Pemuda Revolusi". Koalisi ini terdiri dari berbagai kelompok kaum muda: Pemuda Gerakan 6 April, Pemuda untuk Keadilan dan Kebebasan, Pemuda Ikhwanul Muslimin yang ditangkap rezim yang lalu (Rezim Husni Mubarak) sekitar 30 ribu orang selama sepuluh tahun yang lalu, Pemuda Kampanye Kerakyatan untuk Mendukung El-Baradei, Partai Front dan para independen lainnya yang muncul di jejaring sosial di internet. Koalisi ini menuntut revolusi damai bagi pembangunan demokrasi Mesir masa depan.

Selain gerakan kaum muda, transisi politik Mesir tak bisa dilepaskan dari peran militer. Pasca tumbangya Mubarak, Dewan Agung militer (SCAF) menjadi penguasa masa transisi. Militer sebagai pihak yang menjalankan pemerintahan sementara bertanggungjawab membuat kebijakan yang diperlukan untuk proses transisi. Militer berusaha melibatkan dan selalu berkonsultasi dengan kelompok ahli dan kelompok intelektual. Namun pada faktanya, para jenderal yang berwenang membuat kebijakan seringkali mengambil keputusan secara

sepihak, terkadang cenderung untuk mengamankan kepentingan militer. Walaupun ada agenda politik dari militer, tetapi kekuatan rakyat lebih besar, sehingga tekanan dari rakyat menjadikan militer “tunduk” dengan protes rakyat. Dari sinilah, rakyat bebas berekspresi, menentukan partai politik untuk mengisi masa depan Mesir yang demokratis dan berkeadaban.

Bab III mengkaji sejarah Pemilu Legislatif pasca jatuhnya Mubarak. Pemilu Legislatif merupakan salah satu tuntutan kaum muda Mesir untuk mengamandemen konstitusi. Dewan Agung Militer kemudian membentuk komite yang bekerja untuk mengamandemen pasal-pasal dari Konstitusi terkait dengan reorganisasi sistem politik dan pemilu. Amandemen konstitusi ini dilakukan dalam jangka waktu dua bulan, sebagai langkah awal dari kekuasaan sipil yang demokratis.

Dari pembahasan komite ini, Dewan Agung Militer pada 15 April 2011 kemudian mengumumkan bahwa Pemilu akan dilakukan. Untuk Pemilu Legislatif akan dilakukan tiga putaran, antara bulan November sampai Januari 2012. Sedangkan Pemilu Presiden akan dilakukan pertengahan Juni 2012. Pengumuman Pemilu ini disambut dengan gembira oleh kaum muda Mesir, karena itu tuntutan yang sangat penting dalam melakukan perubahan di Mesir.

Masyarakat Mesir menyambut antusias Pemilu Legislatif ini. Terbukti berbagai tempat pemungutan suara (TPS) dipenuhi warga yang mengantri untuk ikut menentukan masa depan Mesir. Walaupun ada beberapa protes, tetapi secara umum Pemilu Legislatif di Mesir berjalan dengan aman dan terkendali. Baik dalam putaran pertama, kedua dan ketiga, partai berbasis Islam mendapatkan

suara besar, mengalahkan partai berbasis nasionalis yang semasa rezim Mubarak selalu memenangkan Pemilu.

Dari ketiga putaran yang dilangsungkan, KPU Mesir mengumumkan secara keseluruhan hasil Pemilu Legislatif pada 21 Januari 2012. Pemenangnya di pegang oleh FJP dengan 47,18 persen (235 kursi parlemen), disusul Partai An-Nur dengan 25 persen (121 kursi parlemen), Partai Al-Wafd dengan 8 persen (42 kursi parlemen) dan Partai Koliiasi Mesir dengan 7 persen (33 kursi parlemen). Hasil akhir Pemilu Legislatif, partai berbasis ideologi Islam memenangkan Pemilu, sedangkan partai sekuler dan partai nasionalis kalah.

Kemenangan FJP ini merupakan momentum bagi Ikhwanul Muslimin untuk memberikan ide pemikiran dan partisipasi publik secara menyeluruh, karena FJP bukan lagi berada di pinggir kekuasaan, melainkan berada di dalam kekuasaan itu sendiri. Inilah peluang sekaligus tantangan bagi Ikhwanul Muslimin untuk membangun Mesir di masa depan.

Kemenangan FJP dan Partai An-Nur menjadi tantangan serius bagi umat Islam di Mesir secara umum, karena partai berbasis agama (Islam) seringkali diklaim bisa merusak demokrasi. Partai Islam seringkali terkesan secara negatif dengan mendirikan negara agama, sehingga agama lain tidak mendapatkan tempat. Fenomena Mesir menjadi bagian baru kaum islamis di tengah kekuasaan, persoalan kemajuan demokrasi atau kemunduran demokrasi waktu yang akan

Dalam bab IV yang dikaji adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan FJP dalam Pemilu Legislatif. Kemenangan ini dipengaruhi beragam faktor, salah satunya adalah gerak politik FJP menemukan momentum dengan semangat revolusi Mesir. Mesir baru pasca Mubarak mendambakan wajah baru yang memberikan pelayanan buat semuanya, tanpa ada diskriminasi. Semangat perubahan yang ditawarkan FJP dipenuhi dengan semangat islami, bukan Islam yang kaku dan keras, melainkan Islam yang moderat dan toleran. Sikap politik FJP ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari sikap politik Ikhwanul Muslimin.

Ikhwanul Muslimin pada abad ke-21 ini tidak lagi menjadi gerakan Islam yang kaku dan keras, melainkan moderat dan progresif. Muhammad Badi, pimpinan tertinggi (*mursyid 'am*) Ikhwanul Muslimin, menegaskan pihaknya berupaya membangun negara demokratis yang dilandaskan pada prinsip-prinsip kewarganegaraan, penegakan hukum, kebebasan, persamaan, pluralisme, pergantian kekuasaan secara damai melalui pemilu dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

FJP secara politik juga mampu tampil secara reformis dengan melibatkan berbagai kalangan umat Islam, baik sekuler, liberal maupun konservatif dalam membangun Mesir di masa depan. Sikap politik yang merangkul semua golongan ini menjadi modal politik bagi FJP untuk mengangkat suara yang besar. FJP tidak ingin membangun Mesir dengan hanya kader Ikhwanul Muslimin saja, melainkan semua rakyat Mesir secara keseluruhan. Di samping itu, FJP juga merangkul Kristen Koptik untuk bersama membangun Mesir, bahkan ada seorang penganut

Kristen Koptik menjadi pengurus harian dalam FJP

Di samping itu, FJP juga mempunyai kaitan ideologis yang kuat dengan pendukung dan simpatisan Ikhwanul Muslimin di berbagai daerah. Basis massa Ikhwanul Muslimin yang berada di berbagai daerah menjadi kekuatan paling signifikan bagi FJP dalam memenangkan Pemilu. Rakyat merasa dekat dengan Ikhwan, sehingga meniatuhkan pilihan politik kepada saingan politik Ikhwan